

BAB III

**PERAN NORMATIF WWF MENAHAN LAJU PEMBUKAAN LAHAN
KELAPA SAWIT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN DI
INDONESIA**

Industri CPO (*Crude Palm Oil*) merupakan salah satu penyokong terbesar devisa negara Indonesia. Kelapa Sawit menyumbang sekitar 12% bagi pendapatan negara. Pada awal tahun 2008 pendapatan ekspor dari CPO mencapai US\$ 1.984,26 juta meskipun pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 54,02 persen menjadi US\$ 912,37 juta karena penurunan harga CPO dunia yang terkena pengaruh dari krisis keuangan global yang menyebabkan harga minyak dunia turun termasuk juga harga CPO. Namun di tengah iklim industri yang prospektif tersebut isu lingkungan seputar industri CPO terus disuarakan dari berbagai kalangan baik itu LSM dalam negeri maupun luar negeri. Ada satu LSM khusus yang mengawasi industri CPO dalam negeri seperti Sawit Watch, Greenpeace, Green Economics serta WALHI yang terus melakukan kampanye lingkungan seputar industri CPO tersebut.⁴⁴

SPO (*Sustainable Palm Oil*) atau minyak sawit lestari adalah suatu konsep yang dimunculkan oleh kalangan LSM di Eropa pada tahun 2001, dipelopori oleh WWF. WWF menganggap perkebunan kelapa sawit paling bertanggungjawab terhadap kerusakan bahkan hilangnya sebagian besar hutan

⁴⁴ Kelapa sawit Indonesia dan dampaknya terhadap lingkungan, diakses pada tanggal 6 April 2011 dari

tropis serta musnahnya keanekaragaman hayati dalam skala luas, khususnya di Indonēsiā dān Malāysiā. Di berbagai fōrūm internāsiōnal, WWF mengkampanyekan kerusakan lingkungan, punahnya berbagai jenis flora dan fauna, dan menuding bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pihak yang bertanggungjawab.

Berdasarkan berbagai analisis dampak lingkungan setidaknya ada enam dampak negatif dari pembangunan kebun kelapa sawit bagi lingkungan hidup di Indonēsiā. dēngān luās lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah mēncāpai 7,4 juta hektar, dampak negatif perkebunan sawit akan terus meluas seiring bertambahnya areal perkebunan. Kabut asap merupakan masalah pertama, alih fungsi hutan yang menyebabkan rusaknya kemampuan hutan sebagai kawasan penyerap air, penyimpan air, dan mendistribusikannya secara alamiah, semakin sulitnya akses terhadap air bersih karena perusahaan sawit menguasai lahan tempat sumber air, perusahaan sawit sangat intensif menggunakan bahan kimia untuk mendukung sistem perkebunan intensifikasi, penggunaan pestisida dan herbisida dalam jumlah besar di perkebunan kelapa sawit mengakibatkan kualitas air di sekitar wilayah perkebunan menurun, pemakaian bahan kimia dalam bentuk pupuk, pestisida dan herbisida akan menurunkan tingkat kesuburan tanah, penurunan drastis keanekaragaman hayati, dan pembuangan limbah oleh pabrik CPO secara langsung ke sungai di sekitar pabrik masih terus terjadi. Untuk itu

Pemerintah harus mengupayakan adanya aturan mengenai pedoman pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. *Standard Operating Procedure* untuk pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit dapat diberlakukan dalam hal ini. Selain itu untuk jangka panjang pemerintah bekerja sama dengan berbagai kalangan baik itu akademisi maupun LSM untuk melakukan pengembangan dan penelitian langkah pengolahan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan diharapkan adanya aturan atau norma yang mengatur mengenai pembukaan lahan kelapa sawit yang ramah lingkungan.

A. Tantangan Minyak Kelapa Sawit Indonesia di Pasar Internasional

Sejak tahun 2000 posisi, minyak sawit semakin kuat di pasar dunia. Bersama Malaysia, Indonesia mengekspor jutaan ton minyak sawit. Perkembangan produksi dan ekspor minyak sawit itupun tidak sepi dari tantangan. Mulai muncul serangan-serangan gencar yang memperlemah posisi yang kuat tersebut. Para menteri dari Malaysia dan Indonesia bersama pejabat tinggi lain harus pergi ke Eropa untuk menghadapinya.

Karena kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di pasar dunia pada tahun 2005, minyak sawit yang harganya murah mulai dijadikan sebagai alternatif bahan bakar pengganti BBM. Minyak sawit tersebut kemudian diolah menjadi biodisel kemudian diisikan ke dalam tangki mobil. Tahun 2006, harga BBM terus merangkak naik dan juga harga minyak sawit ikut naik petani kelapa sawit yang menjual Tandak Buah Segar (TBS) sawit juga

pasar akan mengendalikan jumlah pemakaian. Jika harga naik, tentu pemakaian biodiesel akan berkurang bahkan terhenti.⁴⁶

Pada akhirnya dalam forum tersebut para peserta menyatakan kesetujuannya terhadap statment yang diajukan oleh pihak Gapki dan Serikat Petani Inggris bahwa sawit penting bagi kemajuan rakyat, namun aspek lingkungan juga harus menjadi fokus utama. Minyak diesel boleh saja dijadikan bahan baku untuk mengatasi kekurangan bahan bakar.

Indonesia sendiri sebagai penghasil minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia, saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 7,4 juta hektar dan masih berencana memperluas kebun sawitnya hingga 20 juta hektar.⁴⁷ Volume ekspor minyak kelapa sawit ke negara-negara Eropa sudah mencapai 5,3 juta ton pada tahun 2009 atau sejumlah seperempat lebih dari total keseluruhan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2009. Namun saat ini menurut analisis Direktorat Pemasaran Internasional/Ditjen P2HP pemasaran minyak sawit Indonesia dan produk-produk turunannya di Eropa mengalami sejumlah tantangan juga.⁴⁸

Perkebunan kelapa sawit Indonesia mendapat isu negatif dari LSM lingkungan mengenai perkebunan sawit yang ada sekarang ini telah merusak lingkungan dan mendorong terjadinya perubahan iklim. Isu tersebut muncul sejak tahun 2001 dimana volume terjadinya kebakaran hutan makin meningkat

⁴⁶ Bangun, Derom. *Memoar Duta Besar Sawit Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. 2010, hal. 8

⁴⁷ Tandan sawit, diakses tanggal 18 Desember 2010 dari <http://www.scribd.com/doc/16807917/Tandan-Sawit-volume-12009>

⁴⁸ Kampanye hitam sawit Indonesia, dikases tanggal 8 Februari 2010 dari <http://www.sinartani.com/sorotan/-balik-kampanye-hitam-sawit-indonesia-ekspor-sawit-ke-eropa-terus-membesar-1293420491.htm>.

di hutan Indonesia. Dampak kebakaran tersebut bahkan sampai ke Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Negara-negara Eropa menganggap terjadinya kebakaran hutan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal itu berimbas pada ekspor CPO di Eropa yang turun secara tajam.

Dengan sejumlah tantangan tersebut, Indonesia diharapkan dapat memperbaiki sistem perkebunan kelapa sawitnya sehingga tuntutan dan tuduhan dari negara-negara Eropa mengenai perusakan lingkungan akan dapat teratasi. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk memajukan kelapa sawit yang ramah lingkungan sebagai upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sesuai yang dicanangkan oleh hasil COP 13 tentang skema REDD yang akan dijalankan nantinya juga aturan yang dikeluarkan oleh FSC mengenai pengelolaan hutan. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam rezim RSPO nantinya dapat menjadi pembuktian kepada dunia internasional bahwa Indonesia mendukung terciptanya minyak sawit ramah lingkungan.

B. Kiprah WWF dalam Pembentukan Rezim RSPO

Masalah lingkungan di Indonesia meningkat sejak tahun 1997. Saat itu terjadi banyak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pada musim kemarau keadaan makin memburuk. Gangguan asap terasa sampai perkotaan, bahkan sampai ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan

darat dan udara tetapi juga menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA).⁴⁹

Tahun 1998 terjadi kelainan cuaca yang disebut El-Nino yang membuat keadaan lebih memburuk. Akibat menurunnya suhu air laut, pembentukan awan semakin berkurang yang berdampak pada curah hujan hujan yang menurun yang menimbulkan kekeringan. Keadaan yang kering itu membuat setiap kebakaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja cepat meluas ke daerah-daerah sekitarnya.

Ratusan titik api di Pulau Sumatera dan Kalimantan terpantau melalui satelit NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*).⁵⁰ Titik api tersebut menyatakan adanya temperatur-temperatur yang relatif tinggi di kedua Pulau tersebut. Hal itulah yang menguatkan WWF mengenai dampak buruk dari perkebunan kelapa sawit. WWF menuding perkebunan kelapa sawit sebagai penyebabnya. Berita di surat kabar tentang kebakaran hutan mulai marak, dan pemberitaan menyangkut mengenai lokasi kebakaran hutan yang berada di dekat areal perkebunan. Pemerintah Indonesia sangat aktif mengatsi kebakaran tersebut dan berupaya keras mengatasinya karena Malaysia dan Singapura telah terkena imbas dan kedua negara tersebut menuntut Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk menanggulangi kebakaran tersebut pemerintah Indonesia sendiri kemudian menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan

⁴⁹ Indoforest, diakses pada tanggal 4 April 2011 dari http://pdf.wri.org/indoforest_chap4_id.pdf.

⁵⁰ FWI 2001, *potret kebakaran hutan*, diakses pada tanggal 4 April 2011 dari http://fwi.or.id/Katalog/Kebakaran_hutan/Indeks.shtml.

Rakyat sebagai koordinator dan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera melakukan upaya pemadaman secara intensif. Namun, pengendalian kebakaran hutan yang semakin meluas. Suara tuduhan kepada pihak perkebunan kelapa sawit makin lama makin keras. Bahkan ada beberapa pihak yang mengungkapkan bagaimana kondisi hutan yang baru dibakar oleh pengusaha perkebunan yang tujuannya adalah untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Menteri Lingkungan Hidup juga berupaya keras melakukan langkah-langkah untuk menanggulangi kebakaran itu, tetapi kemarau yang berkepanjangan akibat El-Nino itu membuat kebakaran semakin tak terbendung.⁵¹

Kebakaran yang semakin meluas pada 1998 dan tuduhan-tuduhan beberapa pihak semakin menyudutkan perkebunan kelapa sawit. Masalah semakin berat ketika insiden lingkungan itu ditambah dengan masalah sosial, pertentangan antara penduduk asli dan pengusaha perkebunan. Keadaan tersebut sampai berlanjut pada tahun 2000. Berita mengenai pembakaran hutan tersebut sampai juga di Eropa terutama di negara Inggris. Pihak negara Inggris memberikan peringatan kepada Indonesia jika tidak dapat mengatasi masalah tersebut, maka tidak segan-segan Inggris melakukan pemboikotan minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Hal tersebut kemudian menggerakkan berbagai pihak untuk memperbaiki cara kerja perkebunan kelapa sawit yang dinilai dapat merusak lingkungan.

Pada tahun 2001 WWF dan industri pabrik pembuat bahan-bahan konsumsi,

⁵¹Indie, *Kebakaran hutan sebagai hasil dari kegagalan pemerintah Indonesia*, diakses pada tanggal 7 April 2011 dari

seperti Unilever dan Migros, untuk membentuk suatu organisasi yang bertujuan memperbaiki praktik-praktik manajemen perkebunan dan industri kelapa sawit. Pertemuan untuk membahas pembentukan rezim tersebut dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia. Selain WWF, Malaysian Palm Oil Association (MPOA) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir utusan-utusan dari beberapa perusahaan di Malaysia, kemudian dari Unilever dan LSM yang lain. Hasil pertemuan tersebut tidak membawa implikasi apa-apa sampai tahun 2003. Prakarsa yang dihasilkan dari pertemuan tahun 2001 tersebut kembali dibicarakan. Pertemuan kedua itu disebut RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Acara dimulai tanggal 20 Agustus sampai 22 Agustus 2003 di Hotel Mutiara, Kuala Lumpur. Pada pertemuan itu konsep yang lebih jelas mengenai tujuan dibentuknya rezim, organisasi, dan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman di dalam pekerjaan selanjutnya sudah menjadi agenda pembahasan. Dalam pertemuan tahun 2003 tersebut dikemukakan prinsip 3P, yaitu People, Planet, Profit.⁵²

People adalah manusia, yang berarti aspek sosial harus dilakukan secara bertanggungjawab tanpa merugikan atau merendahkan martabat manusia, baik sebagai pegawai, pekerja, maupun masyarakat di luar perusahaan. Planet artinya planet bumi harus dijaga keberlanjutannya. Artinya masalah lingkungan hidup, kegiatan perkebunan dan industri kelapa sawit tidak boleh merusak lingkungan secara tidak bertanggungjawab. Profit artinya dampak

⁵² Bangun, *Op. Cit.* Halaman 43-44.

ataupun aspek ekonomi dari perusahaan. Perusahaan harus memperoleh keuntungan agar berkelanjutan. Dengan kata lain, secara ekonomi haruslah layak atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *economically reliable*.

Pada Roundtable Pertama ini slogan 3P tadi dikembangkan menjadi delapan prinsip dan kriteria. Pertemuan ini disebut juga inaugural roundtable, yang sebenarnya digagas oleh tujuh perusahaan dan organisasi, yaitu Aarhus United UK, Inggris; Golden Hope Plantation Berhad, Malaysia; MPOA, Malaysia; Migros, Swiss; Sainburry, Inggris; Unilever, Belanda; dan WWF, Swiss. Pada pertemuan tersebut panitia pelaksana meminta sejumlah pemangku kepentingan untuk memberikan pidato singkat. Semuanya mewakili berbagai pemangku kepentingan yang terdapat pada sepanjang rantai pasokan minyak kelapa sawit, yaitu Derom Bangun dari Gapki, Indonesia; Patrick Baskett dari Socfindo, Indonesia; Manuel Davila Abondano dari Daabon Group, Kolombiia; Vert Vandermissen dari Ghana Oil Palm Development Cooperation (GOPDC), Ghana; Pascal Cogels dari FEDIOL, Eropa; Cyril Clarke dari Lodders Croaklaan Netherlands (IOI Group-Malaysia); Abed Nego Panca Putra Tarigan dari Sawit Watch, Indonesia; Mubariq Ahmad dari WWF Indonesia; Mikail Kavanagh dari WWF Malaysia, dan Veneta Rao atas nama MPOA Malaysia.

Para pemakarsa RSPO termasuk WWF kemudian mengambil langkah-langkah agar RSPO diresmikan secara hukum. Atas dasar pertimbangan dari anggota-anggota dan pemrakarsa, dipilihlah hukum Swiss dan memilih Zurich

sebagai tempat RSPO didaftarkan sebagai organisasi internasional pada

tanggal 8 April 2004. Secara hukum RSPO akan ikut patuh menurut sistem hukum Swiss, yaitu Article 60 Undang-Undang Sipil Swiss. Untuk kegiatan operasionalnya dibentuklah sekretariat yang berkedudukan di Kuala Lumpur.⁵³

Kepengurusan secara struktural dibentuklah dewan pengurus yang disebut EB (Executive Board) atau Dewan Eksekutif. Wakil dari setiap anggota RSPO duduk di dalam EB. Dari Malaysia ada M.R. Chandran selaku Direktur Eksekutif MPOA, dari Indonesia ada Derom Bangun sebagai Ketua Umum Gapki. Kepengurusan di dalam dewan eksekutif terdiri dari pengelola perkebunan, seperti MPOA dan Gapki, perusahaan-perusahaan yang mengolah minyak sawit menjadi turunannya, kemudian consumers goods manufactures atau pabrik-pabrik pembuat keperluan konsumen, seperti Unilever. Kemudian keanggotaan RSPO juga terdiri dari para pengecer atau retail yang menjual produk-produk yang mengandung kelapa sawit, seperti perusahaan kosmetik The Body Shop, kelompok LSM lingkungan seperti WWF, Sawit Watch dari Indonesia, kemudian kelompok yang mewakili bank dan investor, seperti HSBC Bank. Sebagai Sekretaris Jendral RSPO yang pertama dipilih Teoh Cheng Hai.⁵⁴

Pada Roundtable kedua disusul rapat anggota yang bernama General Assembly atau GA, yang merupakan GA pertama. Dalam rapat tersebut disusunlah kepengurusan RSPO secara utuh, Jan Kees Vis dari Unilever

⁵³ RSPO statutes, by-laws and code of conduct, diakses pada tanggal 6 April 2011 dari <http://www.rspo.org/?q=page/896>.

⁵⁴ Executive Board RSPO, diakses pada tanggal 6 April 2011 dari

terpilih sebagai Presiden RSPO. Kemudian dibentuklah tiga vice president, yaitu Mathias Diemmer dari WWF Internasional sebagai vice president pertama, Derom Bangun dari Gapki sebagai vice president dua, dan M.R. Chandran dari MPOA sebagai vice president tiga. Sekretaris Jendral RSPO masih dipegang oleh Teoh Cheng Hai. Namun perubahan kepemimpinan terjadi pada Roundtable berikutnya tetapi komposisi dari tiap jabatan tetap sama.⁵⁵

WWF ikut menjadi pemrakarsa rezim RSPO ini karena WWF karena WWF mengacu pada komitmen WWF mengenai konsep *sustainable development*, WWF tidak hanya fokus terhadap isu-isu lingkungan saja. WWF mengedepankan pada 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan itu sendiri, ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. WWF lebih mengutamakan prinsip keseimbangan yang berjalan sesuai aturan dan perkembangan jaman sehingga aspek lain dapat berjalan dengan baik tanpa membuat salah satu aspek hilang atau tidak berjalan dengan baik.

WWF sebagai rezim sendiri merupakan NGO yang independen dalam politik internasional yang berperan sebagai fasilitator terciptanya agreement dengan cara menyediakan norma, peraturan, dan prinsip sekaligus menyediakan informasi yang sufficient, mengurangi asymmetric information (mencakup moral hazard atau penyimpangan moral) seperti pengaturan mengenai alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan yang mengancam kelestarian lingkungan. Rezim WWF dibentuk guna menciptakan solusi

menyelesaikan masalah di dalam kompleksitas perilaku anggotanya termasuk para pemnagku kepentingan yang terlibat dalam rezim RSPO tersebut secara lebih spesifik.

C. Prinsip dan Kriteria Sebagai Hasil RSPO

Pada Roundtable Pertama RSPO muncul slogan 3P yaitu People, Planet, Profit yang selanjutnya dikembangkan menjadi Prinsip dan Kriteria RSPO. Namun pada Roundtable Pertama ini draft usulan mengenai isi dari Prinsip dan Kriteria tersebut belum selesai dirumuskan. Pihak Proforest dari Inggris kemudian mengusulkan diri sebagai pihak yang akan menyusun draft atau rumusan mengenai Prinsip dan Kriteria tersebut bersama LSM lain seperti WWF. Proforest kemudian menyiapkan satu konsep yang panjang mengenai rumusan Prinsip dan Kriteria yang nantinya menjadi pedoman bagi setiap anggota RSPO. Proforest sendiri merupakan organisasi yang ada sejak tahun 2000. Proforest merupakan organisasi non-profit, Pro Forest sendiri telah berpengalaman bekerja di 40 negara di seluruh dunia.⁵⁶

Pada dasarnya delapan prinsip dan 39 kriteria itu adalah untuk mengendalikan praktik pembukaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup, baik akibat kebakaran maupun akibat pencemaran. Dengan cara itulah dirumuskan apa yang dimaksud dengan minyak sawit berkelanjutan atau minyak sawit lestari atau *Sustainable Palm Oil*. Sudah jelas di dalamnya ada pengertian *zero burning* atau prinsip

tanpa pembakaran, juga ada ketentuan bahwa limbah dari pabrik pengolahan minyak sawit tidak boleh mencemari sungai atau mencemari lingkungan.⁵⁷

Adapun 8 Prinsip yang tercantum dan merupakan hasil dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah :

1. komitmen pada transparansi
2. memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku,
3. komitmen pada kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
4. penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik
5. tanggungjawab lingkungan, konservasi dan keanekaragaman hayati
6. tanggungjawab pada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik
7. pengembangan perkebunan baru yang bertanggungjawab
8. komitmen pada perbaikan terus menerus pada wilayah utama aktifitas.

Sedangkan 39 Kriteria dalam RSPO merupakan penjabaran dan langkah kerja dari Prinsip RSPO itu sendiri atau 39 Kriteria tersebut merupakan teknis yang dijalankan oleh perkebunan kelapa sawit yang ikut dalam RSPO.⁵⁸

⁵⁷ Forest Carbon, diakses pada tanggal 7 April 2011 dari <http://www.personal.umich.edu/~thoumi/Research/Carbon/Forests/Forests,%20Wetlands%20International/CCFPI%20Project/Flyers/Forest%20Fire/Fire02.pdf>.

⁵⁸ Prinsip dan Kriteria RSPO, diakses pada tanggal 7 April 2011 dari

D. Posisi WWF di RSPO sebagai Rezim Sekaligus NGO yang Kooperatif

Isu lingkungan yang terjadi pada saat ini terutama yang diakibatkan oleh konversi hutan secara meluas yang dilakukan oleh para perusahaan kelapa sawit, baik dari isu pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit maupun pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang mengedepankan aspek lingkungan mengakibatkan beberapa LSM tergerak untuk mengatasi isu tersebut dan kemudian menuntut pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang industri kelapa sawit terutama untuk menghentikan tindak perusakan hutan tersebut.

Greenpeace sebagai salah satu NGO lingkungan yang aktif mengkampanyekan isu lingkungan bertindak secara tegas dan melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan hutan tersebut dengan aksi nyata yang langsung kepada para pelaku perusakan lingkungan. Saat adanya isu minyak sawit dijadikan bahan bakar Greenpeace secara tegas mengatakan bahwa penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar akan merusak lingkungan. Pernyataan Greenpeace tersebut mendapat bantahan dari Gapki bahwa pemakaian minyak sawit untuk bahan bakar hanya merupakan bentuk untuk menutup kekrangan BBM akibat harga BBM yang melambung, tapi meningkatnya harga BBM tentu saja berimbas pada harga bahan makanan terutama minyak sawit sehingga pemakaian minyak sawit untuk bahan bakar hanya bersifat sementara dan pasti akan terhenti.⁵⁹

Sebagai organisasi nonpemerintah kawakan dalam bidang lingkungan Greenpeace sangat jeli melihat persoalan lingkungan. Mereka organisasi yang kuat dan memiliki staf yang terdiri dari orang-orang pandai di bidang lingkungan. Hubungan mereka terbentang luas mulai dari sesama aktivis lingkungan sampai dengan media massa. Ada kalanya kampanye yang mereka lakukan langsung bisa diterima sebagai sebuah kesimpulan yang tak bisa diganggu gugat.⁶⁰ Berbagai sorotan Greenpeace terhadap lingkungan bisa kita saksikan di stasiun luar negeri CNN yang seringkali menyuarakan aspirasi mereka. Sering dikatakan bahwa negara-negara yang paling banyak menyumbang gas rumah kaca adalah Amerika Serikat, China, dan Indonesia. Menurut mereka, sumber dari emisi gas tersebut berasal dari lahan gambut.

Begitu juga dengan lahan gambut, pada tahun 1990-an Pemerintah Indonesia membuka sejuta hektar lahan gambut di Kalimantan. Saat itu belum diketahui kalau lahan gambut akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Setelah diketahui dampaknya, secara bertahap dilakukan pengurangan terhadap pembukaan lahan perkebunan di atas lahan gambut. Lahan gambut diyakini berbahaya karena mengeluarkan gas metana yang dapat merusak lapisan ozon.

Berbeda dengan Greenpeace yang menggunakan kampanye independen yang menggunakan konfrontasi tanpa kekerasan, WWF justru

pada sasaran dan solusi bersama dalam menghadapi isu lingkungan seperti pembukaan lahan perkebunan yang merusak lingkungan karena di buka di atas lahan gambut.

Sebetulnya WWF bersama RSPO sendiri secara resmi pernah mengajak Greenpeace untuk masuk dalam keanggotaan RSPO supaya bisa menyampaikan masukan demi perbaikan industri kelapa sawit. Dalam Roundtable Keempat yang berlangsung di Singapura, utusan Greenpeace hadir, tetapi mereka menolak ajakan itu dengan alasan ingin berada di luar lingkaran saja.